

BAB III

HUBUNGAN TURKI DENGAN BANGLADESH DAN KEBIJAKAN TURKI TERHADAP PENGUNGS ROHINGYA

Pasca berkuasanya partai AKP di Turki, kebijakan luar negeri Turki mulai bergeser ke arah baru, dimana Turki lebih fokus membangun relasi ke negara-negara Timur dan Asia. Secara perlahan, kebijakan luar negeri Turki mulai berubah orientasinya, dimana Turki secara perlahan mulai menarik kedekatannya dengan Negara-negara Barat dan kini secara perlahan mulai bergeser orientasinya ke Negara Dunia Timur. Tidak hanya ke bagian Timur akan tetapi Turki juga mulai meningkatkan Hubungannya ke daerah Asia, salah satunya adalah Bangladesh (Budiana, 2015, p. 1). Selain itu, Turki juga semakin aktif dalam membantu kasus krisis pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh. Di dalam bab ini akan memuat analisis tentang hubungan Turki dengan Bangladesh dan sikap pemerintah Turki dalam menyikapi kebijakan pemerintah Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya. Analisis di dalam bab ini dibagi kedalam tiga bagian, bagian pertama membahas tentang latar belakang negara Turki. Bagian kedua menjelaskan tentang hubungan Turki dengan Bangladesh. Bagian ketiga menjelaskan kebijakan pemerintah Turki terhadap pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh.

A. Latar Belakang Negara Turki

Negara Turki merupakan salah satu wilayah yang awalnya didapat melalui ekspansi Dinasti Seljuk dan para imigran Turki ke wilayah barat memasuki wilayah Anatolia. Di sekitar wilayah perbatasan yang diperebutkan oleh Imperium Bizantium tumbuh sejumlah wilayah yang secara legal menerima kedaulatan dari Seljuk. Di wilayah ini terdapat lahan pertanian yang sangat produktif dengan lahan yang cukup luas, serta kota-kota perdagangan yang sebagian menjadi titik penting perdagangan yang melintas dari Iran dan Asia jauh

menuju Medetarian. Oleh sebab itu wilayah tersebut selain memiliki letak yang strategis, akan tetapi juga menyimpan sejumlah kekayaan alam yang melimpah (Rahman, 2014, p. 70).

Turki (Turkiye Cumhuriyeti) pada masa Kerajaan Usmani (Ottoman), dikenal sebagai negara adikuasa yang memiliki peran penting dalam sejarah pengembangan wilayah (futūhāt) Islam. Turki berhasil menyebarkan Islam ke wilayah Eropa setelah menaklukkan Constantinopel pada tahun 1453. Masa pemerintahan Sulaiman I (1520-1566) merupakan puncak dari Turki Utsmani. Pada tahun 1923, Mustafa Kemal Atatürk memproklamasikan Turki menjadi negara republik modern dan sekuler. Negara Turki sendiri terletak di Eropa Tenggara dan Asia Kecil berbatasan dengan Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan Iran di timur; Irak, Suriah, dan Laut Tengah di selatan; Laut Hitam di utara; Laut Aegea di barat; dan Yunani serta Bulgaria di barat laut. Luas: 780.580 km², dan di antaranya 23.764 km² di Eropa Tenggara. Penduduk: 68.893.918, sebagian besar di antaranya berasal dari kelompok etnik Turki. Agama: Islam (99,8%). Ibukota: Ankara (Muhtadi, 2015, p. 1).

Peradaban Islam yang dipengaruhi oleh peradaban Arab dan Persia menjadi warisan penting bagi masyarakat Turki sebagai peninggalan dari Dinasti Utsmani. Selanjutnya Turki mengalami modernisasi yang menyerap unsur-unsur budaya Barat yang dianggap lebih modern. Campuran peradaban Turki, Islam dan Barat, inilah yang kemudian mewarnai identitas masyarakat Turki yang dianggap Kemal Atatürk sebagai penghambat kemajuan Turki (Asari, 2017, p. 134). Ia menginginkan sebuah peradaban baru bagi bangsa Turki, yang dapat mengantarkan Turki di abad ke-20 pada kejayaannya melalui peradaban Barat dengan sekularisasinya di berbagai bidang kehidupan, menggantikan Kesultanan Turki yang absolut berdampingan dengan kekuasaan Syaikhul Islam sebagai sebuah lembaga agama yang berkuasa dan berwewenang dalam urusan negara. Tirani Kesultanan inilah yang dianggap kaum nasionalis Turki menghambat kemajuan

Turki dalam era-modernisasi. Kemudian pada tahun 1923 Kemal Ataturk menyatakan Turki sebagai sebuah negara sekular yang berbentuk republik. Dalam perkembangannya, Kemal Ataturk menghapuskan lembaga Kekhalifahan pada tahun 1924. Kemudian pada tahun 1928, Kemal Ataturk menghapuskan pasal tentang Islam sebagai agama negara sehingga antara agama dan negara tidak ada lagi kaitannya. Dan pada tahun 1937, prinsip sekularisme sebagai dasar konstitusional di Turki diberlakukan secara resmi (Nasution, 1975, p. 153).

Sejak saat itu negara Turki resmi menjadi negara Sekular, yaitu memisahkan kehidupan keagamaan dari institusi-institusi negara. Politik Kemal Atatürk ingin memutuskan hubungan Turki dengan sejarahnya yang lalu, supaya Turki dapat masuk dalam peradaban Barat. Oleh karena itulah, penghapusan *khalifah*-an merupakan agenda pertama yang dilaksanakan (Mu'ammam, 2016, p. 139). Melalui sekularisme Turki, Kemal Ataturk membuat suatu pembaharuan di Turki dengan cara (1) merubah negara Turki dari Kesultanan menjadi Republik, (2) mereformasi agama bertujuan untuk memisahkan agama dari urusan negara dan mengakhiri kekuasaan Syaikhul Islam sebagai sebuah lembaga agama dalam masalah politik, sosial dan kebudayaan, (3) mereformasi bahasa yaitu dengan cara merubah tulisan Arab yang kemudian diganti menjadi tulisan Latin, (4) mereformasi hukum yaitu dengan cara menggantikan Undang-Undang Syariah yang berlaku di Turki menjadi Undang-Undang Sipil Swiss, (5) mereformasi pendidikan yaitu dengan cara melepaskan semua unsur keagamaan dari sekolah-sekolah dan menyatukan sistem pendidikan berada di bawah Kementerian Pendidikan Turki. Hal ini berarti menghapus semua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan Islam terhadap sekolah di Turki (Isputaminingsih, 2014, p. 21).

Gagasan sekularisme semakin kokoh karena, konstitusi Turki dikawal oleh militer, yang berada di bawah kontrol Kemal. Militer adalah tangan besi kekuasaannya untuk mendukung gagasannya. Namun seiring perkembangan yang

ada, sekulerisme menjadi faktor merosotnya eksistensi pemerintahan dan masyarakat yang ada di Turki. Hal ini dapat dilihat dari pemerintahan pasca Kemal Attaturk yang tidak lagi didominasi oleh kelompok-kelompok yang pro akan sekularisme. Akan tetapi kelompok-kelompok Islamis yang semakin mendesak dan menginginkan syariat Islam yang pernah diterapkan di Turki sebelumnya untuk kembali diterapkan. Gerakan-gerakan Islam tersebut seperti gerakan An-Nur yang dipimpin oleh Syaikh Badiuz Zaman Said An-Nursi dan Partai Salamah yang menekan pemerintahan Turki untuk tidak berorientasi ke Barat. Dan saat ini perpolitikan nasional di Turki mulai dikuasai oleh sebuah partai yang berhasil memenangkan pemilu nasional beberapa tahun belakangan yaitu *Adalet ve Kalkynma Partisi* (AKP) atau *Justice and Development Party*. Partai AKP mengklaim dirinya sebagai partai demokrat-konservatif yang menekankan nilai-nilai tradisional Turki yang religius. Pasca AKP menjadi partai pemenang pemilu pada tahun 2002, 2007 dan 2011 memunculkan suasana baru dalam pemerintahan Turki. Jika sebelumnya pemerintahan Turki pernah didominasi oleh kaum militer maka kali ini berasal dari kaum sipil yang lebih religius dan Islami (Zainal, 2016, pp. 15-16).

Munculnya Partai AKP tidak lepas dari perbedaan di kalangan kelompok Islam yang membentuk partai politik. AKP sendiri merupakan bentukan Recep Tayyip Erdogan sebagai respon dari perpecahan di dalam Partai Kebaikan (*Fazilet Partisi*, FP) pada tahun 2000. AKP menolak tuduhan yang menyatakan bahwa parpol ini memiliki agenda politik Islamis. Akan tetapi AKP mengklaim dirinya sebagai partai demokrat-konservatif (*Muhafazakarlar demokrat*) yang lebih menekankan nilai-nilai tradisionalis Turki yang religius. Akan tetapi, kehadiran AKP sesungguhnya juga merupakan akibat dari perjumpaan antara Islam dan negara selama beberapa dekade sebelumnya. Oleh sebab itu, AKP bukanlah suatu kekuatan yang a-historis, meskipun telah menegaskan bahwa dirinya demokrat-konservatif, justru kalangan Islamis dan

sekuleris menuduhnya sebagai kamuflase, dimana ada beberapa kelompok Islamis yang khawatir apabila AKP hanyalah agen politik dari Barat. Tetapi sebaliknya kalangan sekuler justru khawatir apabila AKP menyimpan tujuan untuk mendirikan negara Islam seperti Iran. Dukungan pemilih AKP pada pemilu-pemilu Turki sejak 2002 menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, meskipun gagal meraih suara di atas 50% dengan 34,28% suara pada pemilu 2002. Dengan angka tersebut AKP secara mengejutkan menang telak, bahkan angka dukungan ini melebihi RP pada pertengahan 1990-an. Ketika pemerintahannya dipandang sukses membenahi perekonomian dan menunjukkan kinerja yang progresif pro-Uni Eropa, AKP semakin naik daun dan dukungan suaranya meningkat secara signifikan menjadi 47 % pada pemilu 2007. AKP semakin kokoh sebagai partai tunggal yang tidak harus membangun koalisi dalam pembentukan pemerintahan. Kesuksesannya terulang kembali pada pemilu 2011 (Zainal, 2016, pp. 29-31)

Selain itu, daya tarik dari AKP terletak pada wajah-wajah baru yang moderat dan profesional. Wajah baru yang paling menonjol adalah Recep Tayyib Erdogan yang memiliki latar belakang dan kiprah politik yang jelas. Erdogan sendiri merupakan seorang politisi yang dijuluki sebagai penghapus sekularisme di Turki yang merupakan warisan dari Mustafa Kemal Ataturk. Dengan kebijakan dan aksi politiknya, ia dapat membuat Turki mengalami kemajuan di berbagai bidang, setelah sebelumnya terjatuh dalam paham sekularisme. Dengan kebijakan politiknya, Erdogan mampu meyakinkan masyarakat Turki bahwa dengan identitas Islam, Turki juga dapat mengembalikan kejayaannya tidak hanya kuat dari segi pertahanan, akan tetapi juga kuat di dalam segi perekonomian (Junaidi, 2016, p. ii). Erdogan sendiri pernah menjabat sebagai Ketua Partai Refah (RP) Istanbul, sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Ketua RP di Distrik Beyoglu sejak 1984. Kemudian pada tahun 1991 Erdogan terpilih sebagai anggota parlemen, akan tetapi ia tidak dapat menempati kursinya. Namun, karir politiknya semakin terlihat setelah RP

memenangkan pemilu setempat pada 27 Maret 1994 (25,19% suara). Kemenangan partai yang dipimpin oleh Necmettin Erbakan itu, mengantarkannya sebagai walikota Istanbul, yang merupakan kota paling besar di Turki. Selain itu, Erdogan juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Turki pada tahun 2007. Ketika masa jabatannya sebagai Perdana Menteri Turki selesai pada tahun 2014, Erdogan kemudian mencoba mencalonkan diri sebagai Presiden Turki dengan dukungan dari partai AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi*). Hasilnya pada tanggal 10 Agustus 2014 Erdogan berhasil terpilih sebagai Presiden Turki melalui pemilihan umum menggantikan presiden sebelumnya (Junaidi, 2016, p. 146).

Melihat eksistensi dari langkah politik yang dilakukan Erdogan, memiliki beberapa aksi dalam mentransformasi Turki pada tatanan Islamisme Turki kontemporer. Salah satu dari aksi tersebut terlihat pada kebijakan-kebijakan politik Erdogan baik di dalam maupun luar negeri. Banyak kebijakan yang di implemtasikan dalam politik Turki dengan tujuan yang berbagai macam. Kebijakan politik dalam negeri Erdogan antara lain: a). Menggratiskan biaya pendidikan dimana semua biaya kuliah untuk Rakyat Turki di tanggung oleh pemerintah, b). Selain itu Erdogan juga mengembalikan kebiasaan lama yaitu pengajaran Al Quran dan Hadits di sekolah-sekolah negeri di Turki yang sudah lama dihilangkan, dan kebebasan berhijab di kampus-kampus di Turki, c). Kebijakan mewajibkan pendidikan agama Islam dari tingkat sekolah dasar dan menengah untuk 12 jenjang kelas, d). Pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua, dengan harapan memungkinkan siswa untuk memahami Al-Qur'an. Salah satu kebijakan Erdogan yang dianggap mengkhianati ideologi sekuler Turki adalah pencabutan larangan memakai jilbab. Padahal, sejak pendirian negara Turki sekuler oleh Mustafa Kemal Ataturk, jilbab sudah tidak lagi diperbolehkan berada dalam dinamika pemerintahan dan masyarakat Turki. Karena pelarangan jilbab itulah, Erdogan terpaksa menyekolahkan anak-anak gadisnya ke Amerika dan Eropa yang memang membolehkan siswi berjilbab. Hal ini

karena demi menjaga jilbab agar tidak lepas dari busana anak-anak wanitanya. Erdogan dan partainya mengajukan proposal RUU Paket Demokrasi. Diantaranya, undang-undang yang membolehkan jilbab di sekolah, kampus, dan kantor-kantor pemerintah (Junaidi, 2016, pp. 178-180).

Selain itu, untuk kebijakan luar negerinya sendiri, pengamat Turki dan Barat menilai bahwa kebijakan luar negeri Turki telah bergeser ke sumbu "baru" yaitu fokus ke arah Timur yang "lebih Islami" dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh Attaturk. Secara perlahan, kebijakan luar negeri Turki mulai berubah orientasinya, dimana Turki secara perlahan mulai menarik kedekatannya dengan Negara-negara Barat. Hal ini dikarenakan Turki mulai merubah doktrin politik luar negerinya menjadi konsep *Strategic Depth* dan *Zero Problem*, yaitu sebuah strategi kebijakan dengan memanfaatkan kelebihan Turki baik secara geografi, budaya serta pengaruh sejarahnya sebagai cara Turki dalam berinteraksi dengan dunia Internasional (Budiana, 2015, p. 1). Pergeseran arah orientasi Politik Luar Negeri Turki yang awalnya lebih Pro-Barat kini secara perlahan mulai bergeser orientasinya ke Negara Dunia Timur. Tidak hanya ke bagian Timur akan tetapi Turki juga mulai meningkatkan Hubungannya ke daerah Asia. Identitas Politik Luar Negeri Turki yang baru mulai terlihat ketika Ahmet Davutoglu yang menjabat sebagai menteri Luar Negeri yang memiliki doktrin "*Strategic Depth*". Davutoglu berpendapat bahwa kebijakan Politik Luar Negeri Turki tidak seimbang karena penekanan yang berlebihan Eropa Barat dan Amerika Serikat tetapi cenderung mengabaikan kepentingan Turki dengan Negara-negara lainnya.

Akan tetapi, Turki juga tetap mempertahankan hubungannya dengan Barat, dan Turki juga menaruh perhatian khusus kepada dunia Timur Mengingat hal tersebut didasari oleh sejarah dan posisi geografis Turki sendiri, oleh sebab itu Turki menilai bahwa peningkatan hubungan di Asia dan perluasan pengaruh di kawasan itu adalah sebagai strategi untuk memperbesar pengaruhnya di Eropa. Selain itu, salah satu poin

penting doktrin ini adalah gagasan untuk meminimalisir atau menghilangkan segala masalah dengan tetangga atau yang dikenal dengan istilah *Zero Problems with Neighbors Policy*, karena menurut Davutoglu, kepentingan strategis Turki terletak pada perdamaian, stabilitas, keamanan, kemakmuran di kawasan dan sekitarnya (Dani, 2017). Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan luar negeri yang diambil oleh Erdogan, seperti Penolakan Turki memberikan fasilitas dan kerjasama yang diminta Washington untuk menginvasi Irak tahun 2003, Keberpihakannya pada perjuangan umat Islam di Palestina, merupakan kebijakan luar negerinya untuk mendukung Palestina. Erdogan aktif mengunjungi berbagai negara untuk melakukan lobi dengan tujuan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Selain mendukung Palestina, Turki juga aktif mendukung berbagai macam bentuk penindasan terhadap umat islam di berbagai wilayah, seperti penindasan terhadap etnis Uighur di Tiongkok pada tahun 2009, dan juga penindasan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya yang menyebabkan mereka mengungsi ke berbagai negara (Junaidi, 2016, pp. 181-182).

B. Hubungan Turki dengan Bangladesh

Pergeseran arah orientasi Politik Luar Negeri Turki yang awalnya lebih Pro-Barat kini secara perlahan mulai bergeser orientasinya ke Negara Dunia Timur. Tidak hanya ke bagian Timur akan tetapi Turki juga mulai meningkatkan Hubungannya ke daerah Asia. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Turki yang lebih aktif dalam menangani kasus-kasus kemanusiaan, seperti kasus krisis pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh. Pendekatan penting AKP adalah untuk menggabungkan nilai sejarah-budaya dan sosial-budaya dengan tujuan ekonomi dan politik. Aspek budaya dan sejarah diasumsikan membuka jalan bagi objek kebijakan luar negeri AKP yang proaktif. Bangladesh sendiri cocok dengan skema ini. (Baba, 2017, p. 577)

Meskipun secara geografis Turki dan Bangladesh jauh terpisah satu sama lain, akan tetapi elemen sosial dan budaya mereka memiliki beberapa kesamaan yang menarik. Faktanya, kesamaan ini pengaruhnya jauh lebih kuat daripada ikatan kelembagaan dan politik. Elemen paling penting dari kesamaan tersebut adalah cara orang Bengali melihat model Islam di Turki. Salah satu contoh utama adalah pentingnya *tasawuf* di kalangan Muslim Bengali. Ottoman adalah pendukung besar *tasawuf*. Kedua, pada abad ke-20, Muslim Bengali mendukung integritas teritorial Kekaisaran Ottoman, dimana mereka melihat Kekhalifahan Utsmaniyah sebagai simbol persatuan Muslim di seluruh dunia. Dukungan dari Muslim Bengali tidak hanya untuk lembaga kekhalfahan tetapi juga kepada bangsa Turki, yang mewarisi kekuasaan Ottoman (Ahmed, 2014).

Dan selama Perang India-Pakistan pada tahun 1965, Turki mendukung Pakistan melalui peralatan militer dan transfer tenaga medis. Selama Perang Pembebasan Bangladesh pada tahun 1971, hubungan Turki dan Bangladesh sangat rumit karena dukungan berkelanjutan Turki terhadap Pakistan. Namun, setelah kekalahan Pakistan, Bangladesh didirikan, dan Turki mengakui Bangladesh sebagai negara pada 22 Februari 1974 pada kesempatan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) KTT di Lahore. Turki sendiri adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Bangladesh. Kedutaan Besar Turki di Dhaka kemudian diresmikan pada tahun 1976 dan Kedutaan Besar Bangladesh di Ankara pada tahun 1981. Hingga tahun 2009, Turki dan Bangladesh menyepakati beberapa perjanjian. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai macam bidang, yaitu perdagangan, kerja sama ekonomi dan teknis, budaya, pelatihan dan pendidikan militer, perbankan, maritim, dan perpajakan ganda. Tahun 2009 adalah titik balik dalam hubungan bilateral Turki dan Bangladesh. Dengan memacu proaktifitas dalam kebijakan luar negeri Turki, Ankara mulai meningkatkan pengaruh Turki di bagian-bagian dunia yang sebelumnya bukanlah fokus utama dari Turki. Asia Selatan adalah salah satunya. Karenanya, Presiden Abdullah Gül mengunjungi

Bangladesh pada bulan Februari tahun 2010. Selama kunjungan tersebut, pejabat Turki dan Bengali memutuskan untuk membentuk Dewan Bisnis antara Turki-Bangladesh (Baba, 2017, p. 578).

Hubungan bilateral kedua negara semakin dekat terutama dengan adanya kunjungan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan ke Dhaka pada tahun 2010. Kunjungan Erdogan adalah kunjungan Perdana Menteri Turki yang pertama ke Bangladesh setelah 21 tahun dengan agenda yang ekstensif. Agenda Erdogan sesuai dengan tujuan hubungan antar-negara Asia, yang terutama bersifat ekonomi-komersial. Erdogan menyatakan bahwa peningkatan volume perdagangan dari 47 juta menjadi 658 juta USD dari tahun 2002 hingga 2009 tidak mencerminkan potensi aktual antara kedua negara. Harapan Erdoğan adalah untuk meningkatkan volume ini menjadi 3 miliar USD hingga tahun 2015. Upaya Turki berlanjut pada tahun 2012. Sejak itu, Bangladesh dan Turki telah melakukan pembicaraan untuk menandatangani perjanjian perdagangan bebas.

Bangladesh dan Turki telah menandatangani protokol bersama mengenai perdagangan dan investasi pada tahun 2012. Dimana komisi Ekonomi Bangladesh-Turki telah mengadakan pertemuan beberapa kali untuk membahas cara-cara dalam meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral kedua negara. Pada tahun yang sama, Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki (TIKA) meningkatkan kegiatannya di Bangladesh. Dimana TIKA membuka 10 klinik medis, laboratorium komputer, pusat pendidikan. Kegiatannya saat ini adalah pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur administrasi pendukung di Bangladesh. (Baba, 2017, p. 580) Meskipun hubungan komersial tidak bisa mencapai volume ini, dan pada tahun 2016 nilai impor dan ekspor naik hingga 1 miliar USD. Selama kunjungan Turki dan Para pemimpin Bangladesh juga membahas kerja sama di bidang kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan terorisme (Aira, 2010).

Akan tetapi, pada tahun 2016 jugalah, hubungan diplomatik antara kedua negara menjadi kompleks ketika Bangladesh mengemukakan permintaan Turki yang secara berturut-turut meminta untuk membebaskan beberapa pemimpin Jamaat-e-Islami Bangladesh yang telah dihukum karena kejahatan perang selama Perang Pembebasan Bangladesh oleh Pengadilan Kejahatan Internasional di Bangladesh pada 2013. Ketika Moulana Motiur Rahman Nizami, ketua Jamaat-e-Islami, Partai Politik Islam terbesar di Bangladesh Jamaat-e-Islami dan aliansi Partai Bangladeshionalis yang berkuasa, dieksekusi pada 11 Mei 2016 (Ramani, 2016).

Meskipun terjadi ketegangan antara Turki-Bangladesh, faktor kedekatan sosial-budaya dan sejarah mampu mencegah hubungan bilateral kedua negara dari kehancuran. Duta Besar Bangladesh di Ankara, M. Allama Siddiki, menyatakan bahwa, ia yakin selama masa krisis tersebut, kedekatan politik-budaya antara Turki dan Bangladesh jauh lebih kuat dan lebih besar daripada masalah bilateral yang sedang dihadapi. Walaupun sempat terjadi ketegangan antara Turki dan Bangladesh, akan tetapi, hubungan kedua negara pulih dengan cepat (Zaman S. S., 2016).

Pada tahun 2017, sebuah komite perwakilan dari Bangladesh, yaitu otoritas Pengembangan Investasi dan Kamar Dagang dan Industri Metropolitan mengunjungi Turki pada bulan April-Mei 2017. Beberapa seminar diselenggarakan di Turki mengenai perdagangan dan investasi, yang dihadiri oleh 140 pengusaha Turki, pengusaha industri, dan investor. Di sana ditekankan bahwa 1,2 miliar USD volume perdagangan bilateral jauh di bawah potensi sebenarnya. Untuk meningkatkan volume ini, dikatakan bahwa perusahaan Turki harus berinvestasi lebih banyak di bidang petrokimia, konstruksi, hotel, pariwisata, dan perawatan kesehatan di Bangladesh. Disisi lain, Turki juga mendesak otoritas Bangladesh untuk lebih meningkatkan/meliberalisasi sistem perbankan, bea cukai, dan perpajakan mereka. Hal ini dikarenakan oleh kebutuhan akan investasi asing untuk

mengatasi beberapa kesulitan perdagangan di Bangladesh. Meningkatnya hubungan antara pengusaha dan pejabat kedua negara juga memperkuat hubungan Turki dengan Bangladesh (Baba, 2017, pp. 581-582).

Selain itu, krisis pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh juga menyebabkan hubungan antara Turki dan Bangladesh semakin mendekat. Hal ini juga disebabkan oleh banyaknya bantuan yang dikirim oleh Turki untuk para pengungsi yang ada di Bangladesh, dimana Turki melalui Badan bantuan pemerintah Turki, Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki (TIKA), telah mendistribusikan makanan yang kepada para pengungsi Rohingya di Bangladesh sejak 2016-2017 (Mahmud, 2017).

C. Kebijakan Pemerintah Turki terhadap pengungsi Rohingya di Bangladesh

Banyaknya jumlah pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh tentu membuat pemerintah Bangladesh kesulitan dalam menangani pengungsi Rohingya. Kondisi pengungsi Rohingya yang penuh dan sesak di Bangladesh membuat persediaan bantuan kemanusiaan oleh organisasi-organisasi kemanusiaan menjadi semakin menipis. Banyak permasalahan yang kemudian muncul di kamp pengungsian, seperti kekurangan makanan dan malnutrisi, permasalahan pelayanan kesehatan, persediaan air yang menipis, sanitasi, tempat tinggal, kesempatan dan kebebasan yang terbatas, pendidikan, serta beberapa hal lainnya. Sebagai akibatnya, pengungsi Rohingya tidak hanya menggantungkan hidupnya pada bantuan kemanusiaan. Akan tetapi, mereka mulai berani untuk keluar dari kamp pengungsian untuk mencari pendapatan agar mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka. Karena terdesak oleh keadaan yang serba salah, para pengungsi ini kemudian “menghalalkan” segala cara untuk mendapatkan pendapatan lebih untuk keberlangsungan hidup mereka. Akhirnya mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan ilegal yang mampu mengancam keamanan nasional Bangladesh (Yasyid, 2017, p.

1291). Situasi seperti ini membuat pemerintah Bangladesh memutuskan membuat kebijakan untuk menolak pengungsi Rohingya yang ingin memasuki wilayah Bangladesh. Pemerintah Bangladesh menolak para pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari konflik di Myanmar pada tahun 2016. Para penjaga perbatasan Bangladesh memulangkan kapal-kapal berisi pengungsi Rohingya, meski oposisi di negara itu meminta pemerintah menyediakan perlindungan bagi warga minoritas Muslim tersebut (D, 2016).

Adanya Penolakan dari Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya ini kemudian mendapatkan respon dari pemerintah Turki, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Turki memang aktif dalam membantu kaum muslim yang mengalami tindakan kekerasan atau yang tertindas. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu meminta Bangladesh untuk kembali menerima pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari konflik kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar. Bahkan Turki bersedia untuk menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan Bangladesh kepada pengungsi Rohingya. Kesediaan Turki untuk menanggung seluruh biaya Bangladesh untuk pengungsi Rohingya ini disampaikan Cavusoglu saat berbicara di kantor Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) untuk merayakan hari raya Idul Adha di Provinsi Antalya, pada Jumat, 1 September 2017 (Tempo.co, 2017).

Pada akhirnya, bulan Agustus dan September 2017, Bangladesh kembali menyambut kedatangan beberapa pengungsi secara tiba-tiba. Hal ini diikuti oleh gelombang kekerasan sebelumnya pada Oktober 2016, yang memaksa lebih dari 80.000 Rohingya melarikan diri Bangladesh. Penghormatan Bangladesh terhadap prinsip *non-refoulement* merupakan tindakan yang terpuji, dimana pada saat banyak negara lain membangun tembok untuk mencegah pengungsi Rohingya untuk memasuki wilayah mereka. Saat ini (2018), lebih dari 900.000 pengungsi Rohingya berada di Bazar Cox daerah di ujung selatan Bangladesh. Ini terdiri dari hampir 700.000 pendatang baru di atas lebih dari 200.000 pengungsi

Rohingya sudah tinggal di daerah itu, setelah melarikan diri sebelumnya gelombang penganiayaan dan penindasan di Myanmar. Bangladesh terus membiarkan 11.432 pengungsi lainnya untuk memasuki wilayah Bangladesh sejak awal 2018 hingga akhir Juni 2018 (HRW, 2018).

Dalam laporan yang ditulis oleh *Republic of Turkey Ministry of Interior Disaster and Emergency Management Authority* yang berjudul *AFAD's Humanitarian Aid to Rohingya Refugees in Bangladesh – Report No: 1 – as of December 4th* disebutkan hingga tahun 2017, Kementerian Bencana dan Otoritas Manajemen Darurat Turki (AFAD) telah memberikan berbagai macam bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh, seperti (AFAD, 2017):

1) Makanan dan *non*-makanan

Di bawah koordinasi AFAD, lebih dari 43.000 paket makanan dibagikan kepada penduduk setempat. AFAD, *Turkish Red Crescent* dan TDV juga membangun fasilitas tempat penampungan. Sejak September 2017, TIKA juga telah menyumbang bantuan seperti menyediakan makanan panas untuk 25.000 pengungsi Rohingya yang berisi rumah sakit dan panti asuhan setiap hari. Selain itu, TIKA juga telah mengirimkan 60 ton berbagai bahan makanan, 100.000 set piring, gelas, selimut; tunjangan bahan bakar untuk 1.200 keluarga; susu bubuk untuk 1.000 keluarga. TDV juga menyediakan 7.498 peralatan dapur, 12.750 perlengkapan musim dingin, dan bantuan pakaian mengenai 6.000 pengungsi Rohingya.

2) Koordinasi Kamp dan Manajemen Kamp (CCM)

Untuk mendukung para pengungsi Rohingya yang membutuhkan tempat berteduh, “rumah bambu tahan topan” dirancang oleh para insinyur AFAD seiring meningkatnya jumlah pengungsi rohingya sejak agustus 2017 lalu. Sebanyak 2.065 rumah bambu akhirnya selesai pada Februari 2018 oleh AFAD dan

ditempatkan di wilayah pengungsi Rohingya. Pembangunan 5.685 rumah bambu telah diselesaikan oleh AFAD. Bersebelahan dengan tempat di mana rumah-rumah bambu dibangun, badan-badan bantuan kemanusiaan Turki juga menyelesaikan pembangunan 5 jembatan, di samping pendirian 3 pusat cuci, pusat komunitas, tangki air, pusat pendidikan umum, 9 ruang sholat, 2 lapangan voli / sepak bola, sistem pembuangan limbah, 20 tempat penampungan sampah, 4 sistem energi surya dengan 4.538 panel surya, 48 titik penerangan dan 5 tempat bermain.

3) Kesehatan

Di bawah koordinasi AFAD dan Kementerian Kesehatan Turki, sebuah rumah sakit dibangun di Bangladesh dan akan beroperasi pada tahun 2018. Rumah sakit tersebut terdiri dari 8 poliklinik termasuk: bedah umum, ortopedi, ginekologi, *emergency*, pediatri, penyakit internal, triase, dan poliklinik penyakit menular. Sebanyak 30 personel dari Kementerian Kesehatan Turki ditugaskan untuk bekerja di rumah sakit ini yang gajinya juga ditanggung oleh AFAD. Pembangunan klinik bambu, ruang sholat, unit radiologi, kabin keamanan, saluran air, dan sistem oksigen sentral juga telah selesai dan juga ada 3 kendaraan ambulans dan antar-jemput yang diberikan ke berbagai rumah sakit di Cox's Bazar.

4) Air dan sanitasi

Sebanyak 33 sumur air dan 4 sumur laut dibuat di area kamp dan rumah sakit untuk menyediakan air yang bersih dan sanitasi yang higienis untuk pengungsi Rohingya oleh pemerintah Turki. Selain itu, ada sebanyak 141 toilet dan 124 kamar mandi yang dibangun.

5) Sekolah dan beasiswa

TIKA telah memulai proyek untuk membangun 100 sekolah semi-permanen bekerjasama dengan UNICEF,

sejauh ini sebanyak 30 sekolah telah selesai. Yayasan Diyanet juga memiliki pusat pendidikan dan pusat pendidikan *needlecraft* di dalam area kamp. Yayasan ini memberikan dukungan kepada siswa Rohingya yang belajar di berbagai negara. Ini mencakup semua biaya 110 mahasiswa Rohingya yang belajar di berbagai departemen di Universitas Islam Internasional Chittagong di Bangladesh (Mehmet, 2018).

6) Meninjau situasi pengungsi

Untuk menanggapi kebutuhan yang luar biasa akan bantuan, pemerintah Turki telah meningkatkan kegiatan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya terutama para pengungsi Rohingya yang tinggal di Bangladesh pada tahun 2017. Sebagai tanggapan terhadap kekejaman hak asasi manusia di Myanmar, pemerintah Turki juga meminta PBB untuk mengambil tindakan sebelum krisis kemanusiaan semakin parah. Berkat upaya Pemerintah Turki dan dukungan besar dari komunitas internasional, Dewan Keamanan PBB menghimbau Myanmar untuk menghentikan kekerasan. Pemerintah Turki juga mendesak masyarakat internasional untuk mengutuk dan menekan tindakan yang telah diambil oleh pemerintah Myanmar. Menurut hak asasi manusia yang mendasar dan resolusi PBB, layanan kemanusiaan dasar seperti hak asasi manusia untuk akses ke air bersih dan sanitasi, hak atas tempat tinggal, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan perawatan kesehatan harus diakui dalam rangka realisasi Hak Asasi Manusia. Pemerintah Turki akan terus mendukung etnis Rohingya untuk memastikan keamanan akan hak-hak asasi mereka, namun pemerintah Turki tetap berharap proses repatriasi atau pemulangan etnis Rohingya ke kota asal mereka dapat terlaksana dengan baik dan hidup dalam kedamaian dan keamanan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa, pada saat Turki dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, pada tahun 1937 ia menetapkan prinsip sekularisme sebagai dasar konstitusional di Turki. Namun seiring perkembangan waktu, sekulerisme menjadi faktor merosotnya eksistensi pemerintahan dan masyarakat yang ada di Turki. Hal ini dapat dilihat dari perpolitikan nasional di Turki yang mulai dikuasai oleh sebuah partai yang berhasil memenangkan pemilu nasional beberapa tahun belakangan yaitu *Adalet ve Kalkynma Partisi* (AKP). Pasca AKP berkuasa, kebijakan dalam negeri dan luar negeri Turki mulai berubah. Dengan kepemimpinan Erdogan ia dapat membuat Turki mengalami kemajuan di berbagai bidang, dan dengan identitas Islam, Turki juga dapat mengembalikan kejayaannya tidak hanya kuat dari segi pertahanan, akan tetapi juga kuat di dalam segi perekonomian.

Turki yang aktif dalam membantu kasus krisis pengungsi Rohingya di Bangladesh ini dapat dilihat dari kecaman Turki terhadap pemerintah Bangladesh yang memutuskan membuat kebijakan untuk menolak pengungsi Rohingya yang ingin memasuki wilayah Bangladesh pasca konflik yang terjadi di Myanmar pada tahun 2016 lalu. Dimana Turki melalui menteri luar negerinya meminta Bangladesh untuk kembali menerima pengungsi Rohingya agar dapat kembali mengungsi ke Bangladesh. Pada akhirnya, bulan Agustus dan September 2017, Bangladesh kembali menyambut kedatangan beberapa pengungsi Rohingya.

